



MANAJEMEN PARKIR LIAR DI BAHU JALAN PASAR OLILIT KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

MANAGEMENT OF ILLEGAL ROADSIDE PARKING AT OLILIT MARKET, TANIMBAR ISLANDS REGENCY

Vio Shintia Bulurditty¹, Polikarpus Lalamafu², Aresyama Hein Temmar³, Amtai Alaslan^{4*}

¹Universitas Lelemuku Saumlaki, Email : viobulurdity325@gmail.com

²Universitas Lelemuku Saumlaki, Email : plalamafu@gmail.com

³Universitas Lelemuku Saumlaki, Email : resyotemmar@gmail.com

^{4*}Universitas Lelemuku Saumlaki, Email : alasanamtai@gmail.com

*email koresponden: alasanamtai@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3051>

Abstrack

Traditional markets, as centers of community economic activity, are often not equipped with adequate parking facilities, triggering illegal roadside parking that disrupts traffic flow, as seen in the Olilit Market area, Tanimbar Islands Regency. This study aims to examine how the Saumlaki City Transportation Agency manages illegal roadside parking at Olilit Market and the factors that hinder its implementation. The study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with seven informants (Transportation Agency staff, parking attendants, and community members), and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model with George R. Terry's four management functions (planning, organizing, actuating, controlling) as the analytical framework. The results show that the Transportation Agency has carried out the planning and organizing stages reasonably well, but the actuating and controlling stages have not run optimally due to the absence of official parking attendants and adequate parking space. The main inhibiting factors include limited human resources, insufficient public socialization, weak field supervision, and limited regional budget. This study recommends strengthening cross-sector coordination, accelerating the provision of official parking areas, and intensifying socialization and supervision so that parking management at Olilit Market can run more effectively and efficiently.

Keywords: *Parking Management, Illegal Parking, Transportation Agency, Traditional Market, Olilit Market.*



Abstrak

Pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sering kali tidak dilengkapi fasilitas parkir yang memadai, sehingga memicu munculnya praktik parkir liar di bahu jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas, salah satunya di kawasan Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Saumlaki serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tujuh informan (unsur Dinas Perhubungan, juru parkir, dan masyarakat), serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan empat fungsi manajemen George R. Terry (planning, organizing, actuating, controlling) sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan tahap perencanaan dan pengorganisasian tugas dengan cukup baik, namun tahap pelaksanaan dan pengawasan belum berjalan optimal karena belum tersedianya juru parkir resmi dan lahan parkir yang memadai. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan lapangan, dan keterbatasan anggaran daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas pihak, percepatan penyediaan lahan parkir resmi, serta peningkatan intensitas sosialisasi dan pengawasan agar manajemen parkir di Pasar Olilit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Manajemen Parkir, Parkir Liar, Dinas Perhubungan, Pasar Tradisional, Pasar Olilit.

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi sekaligus sosial yang penting bagi masyarakat. Namun, banyak pasar tradisional di Indonesia yang mengalami permasalahan terkait parkir di bahu jalan, yang umumnya dipicu oleh kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan pasar. Kelancaran arus lalu lintas kerap terganggu akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan, terutama pada jam-jam sibuk.

Keberadaan tempat parkir di Kota Saumlaki sangat dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat yang memiliki kendaraan. Pengaturan mengenai perparkiran termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum. Meski demikian, penyalahgunaan badan jalan sebagai lokasi parkir masih kerap terjadi, termasuk di Kota Saumlaki, sehingga mengurangi hak pengguna jalan lainnya.

Aktivitas di kawasan pasar biasanya membutuhkan dukungan fasilitas parkir yang memadai. Ketika fasilitas tersebut tidak tersedia, pengunjung cenderung memarkirkan kendaraan di bahu jalan sehingga jalan berubah fungsi menjadi tempat parkir dadakan yang mengurangi lebar efektif jalan dan menimbulkan hambatan samping. Kondisi inilah yang teramati di kawasan Pasar Olilit, tepatnya di ruas jalan mulai dari samping Pelabuhan Feri hingga pertokoan selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana peningkatan jumlah kendaraan tidak diiringi ketersediaan lahan parkir yang memadai dari pemerintah maupun pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mendasar yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berjalan secara efektif dan efisien, serta apa saja faktor yang menghambat peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan penertiban terhadap oknum pelanggar parkir di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen parkir liar tersebut ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Saumlaki dalam merumuskan kebijakan penataan parkir yang lebih baik.

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata Prancis *kuno management* yang berarti seni mengatur dan melaksanakan, serta dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengelola atau mengatur. Manajemen dipahami sebagai ilmu sekaligus seni dalam mengatur dan memanfaatkan



berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Terry (sebagaimana dikutip dalam Aditama, 2020) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Hasibuan (2020) menambahkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Terry dan Rue (2020) merumuskan empat fungsi dasar manajemen yang dikenal dengan akronim POAC, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan serta penentuan langkah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya kepada anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara sistematis. Pelaksanaan merupakan upaya menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun pengawasan adalah proses penentuan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan pengemudinya, sebagai kebutuhan bagi setiap pemilik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Parkir liar merupakan aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan secara tidak resmi atau menyalahi ketentuan yang berlaku, baik di bahu jalan, trotoar, maupun lahan yang belum diperuntukkan sebagai kawasan parkir. Manajemen parkir liar dengan demikian dapat dipahami sebagai upaya sistematis pemerintah daerah untuk mengatasi praktik parkir kendaraan yang tidak sah dan tidak sesuai peruntukan, melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan Terry.

Beberapa penelitian terdahulu turut menjadi rujukan dalam penelitian ini. Amuji (2019) meneliti pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menemukan bahwa pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota tersebut relatif transparan karena informasi parkir dapat diakses publik. Sabri (2022) mengkaji manajemen parkir dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan menyimpulkan bahwa pengelolaan parkir di Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun belum optimal. Astawa (2022) meneliti pengaruh parkir di badan jalan terhadap kinerja ruas jalan di Pasar Kreneng, Denpasar, dan menemukan bahwa keberadaan parkir di badan jalan menurunkan tingkat pelayanan jalan secara signifikan. Persada (2022) mengkaji efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare dan menemukan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai peraturan daerah, namun tetap memerlukan penguatan pengaturan lalu lintas seiring meningkatnya kepadatan kendaraan.

Penelitian yang lebih baru turut memperkuat gambaran persoalan parkir liar di berbagai daerah. Indriani et al. (2026) yang meneliti efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penertiban parkir liar di kawasan pasar menemukan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran, dan perbandingan pelaksanaan, tetapi belum optimal akibat keterbatasan jumlah petugas pengawas dan lemahnya tindakan korektif di lapangan. Pratama et al. (2025) yang mengkaji efektivitas elektronik parkir di Kota Bandung juga menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan parkir sangat bergantung pada intensitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir maupun pengguna jalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus kajian manajemen atau pengelolaan parkir menggunakan kerangka fungsi manajemen George R. Terry, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian, yaitu Pasar Olilit Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebuah kawasan pasar di daerah kepulauan dengan karakteristik kelembagaan dan sumber daya yang berbeda dari kota-kota besar yang menjadi lokasi penelitian sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bermaksud memahami secara mendalam bagaimana manajemen parkir liar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Saumlaki berdasarkan pengalaman,



persepsi, dan tindakan subjek penelitian (Moleong, 2017). Desain studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data dari berbagai sumber dan sudut pandang partisipan (Creswell, 2013).

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Dinas Perhubungan Kota Saumlaki dan kawasan Pasar Olilit yang membentang dari samping Pelabuhan Feri hingga pertokoan selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang berwenang mengelola parkir di tepi jalan umum, serta tingginya intensitas pertumbuhan kendaraan bermotor di kawasan pasar tersebut. Penelitian dilaksanakan sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025.

Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri atas unsur Dinas Perhubungan Kota Saumlaki (Kepala Bidang Prasarana dan Sekretaris Dinas), juru parkir, pedagang, dan masyarakat pengguna kawasan parkir, yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait manajemen serta perparkiran (Yin, 2019).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Alaslan, 2021). Keabsahan data diuji melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan serta antara hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit dilakukan berdasarkan empat fungsi manajemen menurut Terry dan Rue (2020), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

A. Perencanaan (*Planning*)

Dinas Perhubungan Kota Saumlaki telah melakukan tahap perencanaan penanganan parkir liar dengan merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Saumlaki dalam wawancara:

“Dinas sudah melakukan perencanaan untuk mengatasi parkir liar pada lokasi Pasar Olilit, dan akan memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu dari pihak pemuda GPM, dari Katolik dan Muslim, untuk membantu dalam hal ini penertiban parkir liar.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Bidang Prasarana yang menyebutkan bahwa perencanaan penertiban telah disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Pajak Daerah, dan penertiban menyeluruh direncanakan berlangsung pada bulan berikutnya. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam perencanaan tersebut mencakup penetapan aturan dasar dan penetapan zona parkir yang diizinkan maupun dilarang. Perencanaan penataan parkir bahkan telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Saumlaki tahun 2024. Namun demikian, hingga tahun 2025 belum terdapat penambahan fasilitas parkir elektronik maupun perluasan lahan parkir karena tidak tersedianya anggaran khusus untuk proyek tersebut, sehingga masyarakat tetap memarkirkan kendaraan di badan jalan sekitar Pelabuhan Feri.

Temuan ini sejalan dengan Pratama et al. (2025) yang menegaskan bahwa keberadaan regulasi dan perencanaan formal semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pengelolaan parkir apabila tidak diikuti dengan dukungan anggaran dan realisasi di lapangan.

B. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada tahap pengorganisasian, Dinas Perhubungan Kota Saumlaki telah membagi tugas penanganan parkir kepada Bidang Prasarana yang membawahi Seksi Perencanaan Prasarana dan Seksi Pembangunan Prasarana. Sekretaris Dinas menjelaskan:

“Dinas Perhubungan sudah membagi tugas dan tanggung jawab kepada bidang yang berwenang untuk melakukan tugasnya terkait parkir, yaitu Bidang Prasarana yang membawahi dua seksi... untuk mencapai tujuan.”



Seksi Perencanaan Prasarana bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, sedangkan Seksi Pembangunan Prasarana bertugas melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan fasilitas parkir serta menetapkan lokasi pengoperasian fasilitas terminal dan parkir umum. Pembagian tugas ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Prasarana yang menyatakan bahwa *“pihak Dinas Perhubungan sudah secara jelas membagi tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.”* Secara umum, tahap pengorganisasian telah berjalan cukup baik karena struktur, tugas pokok, dan fungsi masing-masing unit telah ditetapkan secara jelas dan didokumentasikan.

C. Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahap pelaksanaan merupakan titik lemah utama dalam manajemen parkir liar di Pasar Olilit. Meskipun perencanaan dan pengorganisasian telah disusun, implementasi di lapangan belum berjalan optimal karena Dinas Perhubungan belum menugaskan juru parkir resmi. Kepala Bidang Prasarana menyampaikan:

“Sampai saat ini dari Dinas Perhubungan masih membuat penjajakan untuk beberapa pihak agar bekerja sama dalam mengatasi parkir liar. Dan sampai saat ini belum adanya juru parkir yang diturunkan dari Dinas; ketika kedatangan ada juru parkir di lapangan, itu namanya juru parkir liar.”

Kondisi ini dikeluhkan langsung oleh masyarakat pengguna kawasan Pasar Olilit. Salah satu warga menyatakan, *“Menurut saya pelaksanaannya tidak baik, karena tidak ada lahan parkir sehingga masyarakat sulit untuk memarkirkan kendaraannya.”* Keluhan serupa juga disampaikan oleh seorang pedagang di lokasi penelitian: *“Pelaksanaannya tidak baik, karena belum adanya lokasi parkir yang baik.”* Ketiadaan lahan parkir yang memadai serta belum adanya juru parkir resmi menyebabkan kendaraan diparkir tidak beraturan di sepanjang bahu jalan kawasan pasar.

Sebagai langkah mitigasi, Dinas Perhubungan berencana bekerja sama dengan organisasi pemuda lintas agama (GPM, Katolik, dan Muslim) untuk membantu pengelolaan parkir, disertai penyusunan surat perjanjian tata kelola parkir agar pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi. Namun demikian, hingga penelitian ini dilakukan, kerja sama tersebut masih berada pada tahap penjajakan dan belum terealisasi secara menyeluruh di lapangan.

D. Pengawasan (*Controlling*)

Dinas Perhubungan Kota Saumlaki mengklaim telah melakukan pengawasan secara rutin dengan turun langsung ke lapangan, memasang rambu larangan parkir di kawasan Pelabuhan Feri hingga pertokoan selatan, serta menyarankan masyarakat untuk meminta karcis resmi kepada juru parkir. Sekretaris Dinas menyatakan:

“Dari pihak Dinas Perhubungan sudah melakukan pengawasan kepada masyarakat pada lokasi Pasar Olilit (samping Pelabuhan Feri sampai dengan pertokoan selatan), sudah diberikan rambu larangan parkir.”

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena razia penertiban parkir liar masih bersifat insidental, bukan pengawasan yang berkesinambungan. Kondisi ini konsisten dengan temuan Indriani et al. (2026) di kawasan Pasar Jambi, yang menunjukkan bahwa pengawasan berbasis empat tahapan Terry (penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan dengan standar, dan tindakan korektif) sering kali terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan. Pola yang sama tampak di Pasar Olilit, di mana pengawasan belum melibatkan mekanisme pelaporan masyarakat yang terstruktur maupun evaluasi berkala terhadap kinerja juru parkir.

E. Faktor Penghambat Manajemen Parkir Liar

Selain menganalisis keempat fungsi manajemen, penelitian ini juga mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat pelaksanaan manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Hingga saat ini Dinas Perhubungan belum memiliki juru parkir resmi yang ditugaskan di kawasan Pasar Olilit, dan sistem penggajian juru parkir pun belum diatur secara jelas. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memarkirkan kendaraan pada tempat yang semestinya juga masih rendah, sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga: *“Hambatan yang sering dialami masyarakat ketika memarkirkan kendaraan yaitu tidak adanya tempat parkir, sehingga mereka parkir di sembarang tempat.”*



Kedua, minimnya sosialisasi. Masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan parkir belum sepenuhnya memahami aturan-aturan baru terkait parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Seorang pedagang di lokasi penelitian menyampaikan, “Kurangnya sosialisasi dari Dinas mengenai aturan yang sudah ada terkait dengan perparkiran.” Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara Dinas Perhubungan dan masyarakat pengguna kawasan pasar.

Ketiga, lemahnya pengawasan lapangan. Kurangnya pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum juru parkir liar serta menyebabkan hasil program penertiban tidak sesuai harapan. Seorang warga menyatakan, “Sebaiknya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan lebih ditingkatkan lagi, karena terkadang di lapangan tidak ada juru parkir yang bisa membantu dalam pelayanan parkir kepada masyarakat.”

Keempat, keterbatasan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan bagian penting dari keberhasilan setiap tahap manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Belum terealisasinya penerapan sistem parkir secara menyeluruh di Pasar Olilit terutama disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran daerah yang memadai untuk pembangunan fasilitas parkir maupun pengadaan juru parkir resmi.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan mendasar dalam manajemen parkir liar di Pasar Olilit bukan terletak pada absennya kebijakan atau struktur organisasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Pola ini konsisten dengan sejumlah studi kasus serupa di daerah lain (Astawa, 2022; Persada, 2022; Sabri, 2022; Indriani et al., 2026), yang menegaskan bahwa efektivitas manajemen parkir sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, bukan semata pada kelengkapan dokumen perencanaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen parkir liar di bahu jalan Pasar Olilit Kabupaten Kepulauan Tanimbar, apabila ditinjau dari empat fungsi manajemen George R. Terry, secara umum belum berjalan efektif. Tahap perencanaan dan pengorganisasian telah dilaksanakan cukup baik melalui penyusunan regulasi, penetapan zona parkir, dan pembagian tugas antarbidang di Dinas Perhubungan. Namun demikian, tahap pelaksanaan dan pengawasan masih lemah karena belum tersedianya juru parkir resmi maupun lahan parkir yang memadai di kawasan tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan manajemen parkir liar meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan lapangan, dan keterbatasan anggaran daerah. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Saumlaki telah melakukan peninjauan kerja sama dengan organisasi kepemudaan lintas agama untuk membantu penertiban, realisasi kerja sama tersebut hingga penelitian ini dilakukan belum berjalan secara menyeluruh.

Penelitian ini merekomendasikan tiga hal utama. Pertama, Dinas Perhubungan Kota Saumlaki perlu mempercepat penyediaan lahan parkir resmi dan penugasan juru parkir bersertifikat di kawasan Pasar Olilit. Kedua, perlu ditingkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan perparkiran, disertai penguatan mekanisme pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran. Ketiga, diperlukan penganggaran daerah yang memadai serta pengawasan berkala terhadap kinerja Dinas Perhubungan agar manajemen parkir di Pasar Olilit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek pembiayaan dan potensi penerapan sistem parkir elektronik sebagai solusi jangka panjang atas persoalan parkir liar di kawasan pasar tradisional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). Pengantar manajemen: Teori dan aplikasi. AE Publishing.
 Alasan, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
 Amuji, A. (2019). Pengelolaan parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (Studi kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh) [Skripsi, Universitas Syiah Kuala].



- Astawa, I. T. M. (2022). Studi manajemen parkir terhadap kinerja jalan di Pasar Kreneng Denpasar [Skripsi, Universitas Udayana].
- Creswell, J. W. (2013). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods (Ed. ke-3). Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah (Ed. revisi). Bumi Aksara.
- Indriani, N. D., Hapsa, H., & Syahrier, F. A. (2026). Efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar di kawasan Pasar Jambi. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 3(2), 105–119. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1623>
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Persada, U. N. (2022). Efektivitas penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Parepare [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Parepare].
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Pratama, M. F. R., Fauzi, L. M., & Fujilestari, N. A. (2025). Pengaruh pengawasan Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap efektivitas elektronik parkir di Kota Bandung (Studi kasus Jalan Astana Anyar). Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 1(3). <https://doi.org/10.36859/jp.v1i3.4006>
- Sabri, I. M. (2022). Manajemen parkir dalam upaya meningkatkan pelayanan publik [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2020). Dasar-dasar manajemen (Ed. terjemahan). Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Yin, R. K. (2019). Studi kasus: Desain dan metode (Ed. revisi). PT RajaGrafindo Persada.